

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi terus berkembang pesat serta tujuan pemerintah pusat dalam mencapai *smart city* di Indonesia, sehingga menuntut pemerintah daerah agar mampu secara optimal guna mendukung *smart city* di berbagai daerah yang ada di Indonesia terkhususnya pemerintah Kota Bekasi dan Kabupaten Banyumas [1]. *Smart-city* merupakan suatu gerakan yang digencarkan oleh pemerintah dalam rangka mendigitalisasikan kabupaten dengan tentunya infrastruktur – infrastruktur yang seharusnya sudah dimiliki oleh kabupaten atau kota yang menjadi incaran dalam gerakan *smart-city* [2].

Smart-city yang sedang ramai dibahas oleh banyak orang di berbagai negara menuntut adanya kemudahan pengaksesan informasi untuk mendukung aktifitas sehari-hari, pasalnya masyarakat dapat dengan cepat memperoleh informasi yang dibutuhkan dimanapun dan kapanpun selama terhubung dengan jaringan komunikasi [2]. *Smart city* adalah konsep kota cerdas yang dirancang guna membantu berbagai kegiatan masyarakat serta memberikan kemudahan mengakses informasi kepada masyarakat [3].

Konsep ini menekankan pada tiga konsep, pertama, sebuah konsep yang diterapkan oleh sistem pemerintahan daerah dalam mengelola masyarakat perkotaan, kedua mensyaratkan pengelolaan daerah terhadap segala sumber daya dengan efektif dan efisien dan ketiga *smart city* diharapkan mampu menjalankan fungsi penyedia informasi secara tepat kepada masyarakat dan mampu mengantisipasi kejadian yang tak terduga [3].

Transformasi menuju konsep *Smart City* telah menjadi suatu keharusan dalam upaya meningkatkan efisiensi, kenyamanan, dan kualitas hidup masyarakat perkotaan [3]. Keduanya memiliki karakteristik yang mungkin berbeda dalam menghadapi tantangan dan peluang dalam mengadopsi teknologi informasi untuk meningkatkan pelayanan publik dan infrastruktur perkotaan [4].

Peran pemerintah daerah dalam mendorong inovasi dan mengelola transformasi ini menjadi faktor kunci yang perlu dicermati [4]. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-komparatif dengan pendekatan kualitatif. Metode deskriptif adalah suatu metode yang meneliti suatu kelompok manusia, objek, set kondisi, ataupun suatu kelas peristiwa [5]. Tujuan dari penelitian deskriptif-komparatif ini untuk membandingkan data peran Pemerintah Kota Bekasi dan Kabupaten Banyumas yang dimana juga dilakukan pendekatan kualitatif yang dapat diartikan sebagai suatu kumpulan data yang diperoleh berdasarkan wawancara, catatan lapangan, dokumen pribadi, ataupun dokumen resmi lainnya [5]. Metode *comparative descriptive* lebih unggul dalam analisis perbandingan peran pemerintah dalam *smart city* karena metode ini lebih mudah dilakukan dan lebih mudah dipahami [6]. Metode ini juga lebih fleksibel dan dapat digunakan untuk menganalisis berbagai aspek peran pemerintah dalam *smart city* [6]. Jika dibandingkan dengan Metode *Technology Acceptance Model* (TAM) yang hanya fokus pada faktor-faktor yang berhubungan dengan pengguna teknologi, yaitu *Perceived Usefulness* (PU) dan *Perceived Ease of Use* (PEOU). Padahal, dalam konteks *smart city*, peran pemerintah tidak hanya sebagai pengguna, tetapi juga sebagai penyedia teknologi [7]. Oleh karena itu, analisis peran pemerintah dalam *smart city* perlu mempertimbangkan faktor-faktor lain, seperti kebijakan pemerintah, infrastruktur teknologi, dan sumber daya manusia [7]

Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas melalui inovasi dalam Peraturan Bupati No. 53 Tahun 2021 tentang rencana induk Banyumas kota cerdas. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) huruf j Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika, Pemerintah Kabupaten Banyumas diberi kewenangan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika sub urusan aplikasi informatika yang berupa kota cerdas, sehingga perlu menetapkan Peraturan Bupati Banyumas tentang Rencana Induk Banyumas Kota Cerdas; Banyumas merencanakan 118 program atau inovasi yang terdiri dari 44 usulan program untuk *smart governance*, 3 usulan program untuk *smart branding*, 10 usulan program untuk *smart economy*, 2 usulan program untuk *smart environment*, 21 usulan program untuk *smart society*, dan 33 usulan program untuk *smart branding* [8].

Program pemerintah daerah Kabupaten Banyumas menuju *smart city* dituangkan dalam *master plan* Kabupaten Banyumas yang dapat dilihat pada Gambar 1.1 [8].



Gambar 1. 1 Master Plan Kabupaten Banyumas [8]

Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 02 Tahun 2020 tentang penyelenggaraan *smart city* Pemerintah Kota Bekasi dalam peraturan daerah ini diatur tentang konsep dan prinsip penyelenggaraan *smart city*, dimensi penyelenggaraan *smart city*, partisipasi dan peran serta *stakeholder*, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan *smart city*, pembiayaan, kemitraan dan peran serta Masyarakat serta dunia usaha dalam penyelenggaraan *smart city*, insentif dan penghargaan [9]. Adanya perbedaan peran tersebut perlu dilakukan analisis perbandingan peran pemerintah menuju *smart city* agar diperoleh pemahaman yang lebih baik. Penelitian ini akan menyelidiki dan membandingkan strategi serta peran pemerintah dalam mendorong konsep *smart city* di dua kota, yaitu Bekasi dan Kabupaten Banyumas. Evaluasi juga dilakukan terhadap dampak implementasi *smart city* terhadap kehidupan sehari-hari masyarakat dan kinerja pemerintah setempat.

Hasil penelitian memberikan gambaran mengenai kendala, tantangan, serta manfaat yang diperoleh oleh kedua kota dalam bentuk rekomendasi. Rekomendasi yang disajikan dalam penelitian ini dapat menjadi panduan bagi Pemerintah Kota Bekasi dan Kabupaten Banyumas, serta memberikan kontribusi penting terhadap literatur *smart city*, terutama dalam konteks perbandingan peran pemerintah di dua lokasi berbeda. Penelitian ini tidak hanya memberikan pemahaman yang lebih baik tentang implementasi *smart city*, tetapi juga menawarkan pandangan yang bernilai untuk pengembangan strategi dan kebijakan di masa mendatang.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis perbandingan peran Pemerintah Kota Bekasi dan Kabupaten Banyumas dalam mengimplementasikan konsep *smart city* menggunakan metode *comparative* deskriptif. Penelitian ini diharapkan dapat menggambarkan perbedaan dan kesamaan dalam

strategi, kebijakan, dan implementasi *smart city* yang dapat memberikan wawasan berharga bagi pemerintah, akademisi, dan praktisi dalam upaya untuk mewujudkan *smart city* yang efektif dan berkelanjutan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan sebelumnya tentang latar belakang, permasalahan yang diidentifikasi dalam penelitian ini meliputi peran pemerintah terhadap keberhasilan implementasi infrastruktur dan layanan lainnya yang menjadi tujuan pemerintah kota guna mencapai Kota Cerdas di Indonesia. Penelitian ini juga menemukan permasalahan yang teridentifikasi terhadap perbandingan peran dan strategi yang digunakan oleh Pemerintah Kota Bekasi dan Kabupaten Banyumas dalam upaya mencapai visi *smart city*. Peran Kota Bekasi lebih fokus dengan penerapan internet publik, strategi Kota Bekasi lebih fokus untuk pengembangan *Internet Of Things (IOT)*. Sehingga, tertinggal dalam penerapan aplikasi layanan masyarakat. Kabupaten Banyumas memiliki hal sebaliknya, peran pemerintah Kabupaten Banyumas dalam smart city berfokus pada aplikasi pelayanan masyarakat, strategi pemerintah Kabupaten Banyumas berfokus dalam pengembangan aplikasi masyarakat. Sehingga adanya keterlambatan penerapan serta pengembangan *Internet Of Things (IOT)*.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan pada perumusan masalah yang sudah diuraikan di atas maka pertanyaan penelitian antara lain :

1. Bagaimana peran Pemerintah Kota Bekasi dan Kabupaten Banyumas dalam mengimplementasikan konsep *Smart City*?
2. Bagaimana cara membandingkan peran serta strategi Pemerintah kota Bekasi dan Kabupaten Banyumas dalam *Smart City* menggunakan metode *Comparative Deskriptif*?

3. Apa rekomendasi yang dapat diberikan untuk kedua kota tersebut dalam menerapkan *Smart City*?

1.4 Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa tujuan yang ingin dicapai, antara lain :

1. Membandingkan peran Pemerintah Kota Bekasi dan Kabupaten Banyumas dalam *Smart City*.
2. Membandingkan strategi Pemerintah Kota Bekasi dan Kabupaten Banyumas dalam *Smart City*.
3. Memberikan Rekomendasi kepada kedua Pemerintah kota tentang cara meningkatkan implementasi *Smart City* dengan memaksimalkan peran Pemerintah Kota Bekasi dan Kabupaten Banyumas.

1.5 Batasan Masalah

Penelitian ini berfokus pada perbandingan peran Pemerintah Kota Bekasi dan Kabupaten Banyumas dalam mengimplementasikan konsep *Smart City*. Namun, perlu diperhatikan beberapa batasan masalah, yaitu:

1. Penelitian ini membatasi diri pada peran Pemerintah kota dalam pengembangan *Smart City* dan tidak akan memasukkan peran sektor swasta atau masyarakat sipil.
2. Analisis berfokus pada aspek *smart governance* dan tidak memasukkan aspek *smart city* lainnya.
3. Analisis berfokus pada dua wilayah yang berbeda, yaitu Kota Bekasi dan Kabupaten Banyumas. Meskipun banyak kota lain yang juga memiliki inisiatif *Smart City* akan difokuskan pada dua kota ini untuk memungkinkan perbandingan yang lebih mendalam.
4. Penelitian ini menggunakan metode *comparative* deskriptif untuk membandingkan peran Pemerintah Kota Bekasi dan Kabupaten Banyumas. Metode ini digunakan untuk memberikan

deskripsi yang rinci tentang peran masing-masing pemerintah kota dalam mengembangkan *Smart City*.

1.6 Manfaat Penelitian

Berikut adalah beberapa manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini:

1. Memberikan wawasan yang mendalam tentang peran pemerintah dalam pengembangan *Smart City*.
2. Sebagai panduan untuk memperbaiki dan meningkatkan inisiatif *Smart City* di Kota Bekasi dan Kabupaten Banyumas.
3. Sebagai dasar bagi Pemerintah Kota Bekasi dan Kabupaten Banyumas untuk mengembangkan kebijakan yang lebih efektif dalam mendukung *Smart City*.
4. Membantu dalam pemahaman tentang kontribusi *Smart City* terhadap keberlanjutan dan kualitas lingkungan yang penting dalam menghadapi tantangan lingkungan saat ini.